

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia memiliki fungsi dalam mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Agar dapat mewujudkan hal tersebut, segala potensi dan sumber daya yang ada harus dialokasikan secara efektif dan efisien secara terus menerus yang disebut dengan pembangunan nasional. Dalam mewujudkan pembangunan nasional bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat saja, tetapi pemerintah daerah juga memiliki peran yang sama untuk keberhasilan tersebut. Hal ini terlihat pada pemerintah pusat melalui otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengelolah daerahnya sendiri.

Industri pariwisata semakin dikembangkan oleh banyak negara karena memberikan manfaat ekonomi, termasuk Indonesia. Daerah-daerah di Indonesia berlomba mengembangkan kawasan wisata agar daerahnya menjadi salah satu daerah tujuan wisata. Potensi daerah dikembangkan menjadi objek wisata untuk ditawarkan kepada pengunjung.

Pariwisata memberikan banyak manfaat dalam pembangunan. Pemerintah menetapkan bahwa kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi; meningkatkan kesejahteraan rakyat; menghapus kemiskinan; mengatasi pengangguran; melestarikan alam, lingkungan dan sumberdaya; memajukan kebudayaan; mengangkat citra bangsa; memupuk rasa cinta tanah air; memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan mempererat persahabatan antarbangsa (UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata).

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Sektor pariwisata menjadi penting sebagai penyumbang devisa andalan dan

meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2013 ranking devisa sektor pariwisata terhadap komoditas ekspor lainnya telah menduduki peringkat keempat dengan nilai 10,054,1 (juta US\$). Menurut Neraca Satelit Pariwisata Nasional tahun 2012, sektor pariwisata menyumbang 3,96% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan memberikan dampak kenaikan serapan tenaga kerja sebanyak 8,46%.

Indonesia sebagai negara berkembang dapat memanfaatkan pariwisata sebagai media pembangunan yang tidak membutuhkan dana yang terlalu besar. Daerah-daerah di Indonesia memiliki kekayaan potensi alam dan budaya yang dapat dijadikan modal dalam mengembangkan pariwisata. Jika dikelola dengan baik, daerah-daerah di Indonesia dapat menarik wisatawan untuk datang. Kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri memberikan keuntungan bagi daerah wisata yang dituju. Wisatawan datang membawa dana dari daerah asalnya dan dibelanjakan di daerah yang menjadi tujuan wisata. Dana ini kemudian menjadi salah satu elemen penggerak pembangunan di daerah.

Shakibul Amnar menjelaskan bahwa :

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada saat ini ditunjang oleh sektor-sektor yang terus berkembang dan menunjukkan angka perbaikan dalam meningkatkan pendapatan atau devisa bagi Indonesia. Sektor-sektor tersebut seperti sektor pariwisata yang pada saat ini telah berkembang menjadi salah satu industri terbesar bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, ini dapat dilihat dari meningkatnya perkembangan jumlah kunjungan turis baik wisatawan nusantara maupun mancanegara.¹

Berdasarkan hal tersebut jelas diketahui bahwa perkembangan dari pariwisata menjadi salah satu hal yang penting untuk mendukung kondisi perekonomian menjadi lebih baik lagi. Sumbangan dari sektor pariwisata terhadap kondisi perekonomian telah menjadi alternative

¹ Shakibul Amnar, Said Muhammad, Mohd. Nur Syechalad, Pengaruh Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Sabang, **Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia**, Universitas Syiah Kuala – Aceh, Volume 4, Nomor 1, Mei 2017, hal. 14.

baru untuk meningkatkan keadaan perekonomian yang lebih baik lagi, terlebih lagi bahwa sektor pariwisata adalah sektor yang cukup *fleksibel* untuk dijalankan baik oleh pihak swasta badan maupun per orang serta oleh pihak pemerintah.

Perolehan pendapatan daerah diperlukan manajemen pemanfaatan dana yang mampu digunakan semaksimal mungkin bagi kemakmuran masyarakat melalui program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut. Dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu.

Berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku yang terdiri atas:

1. Hasil pajak daerah yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada semua objek pajak, seperti orang / badan, benda bergerak / tidak bergerak.
2. Hasil retribusi daerah, yaitu pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa/fasilitas yang berlaku oleh pemerintah daerah secara langsung dan nyata.
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain laba dividen, penjualan saham milik daerah.
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah antara lain hasil penjualan aset tetap dan jasa giro.

Menurut Nurcholis sebagaimana dikutip oleh Abid Muhtarom menjelaskan bahwa “pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lain-lain yang sah”.²

²Abid Muhtarom, **Analisis Pad (Pendapatan Asli Daerah) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2010-2015**, Jurnal EKBIS / Vol . XIII / No . 1, Universitas Islam Lamongan : Fakultas Ekonomi, hal 660.

Tabel 1.1 Jumlah Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Samosir Tahun 2013-2017

Tahun	Total Pendapatan Asli Daerah (rupiah)
2013	Rp 26.661.000.000,-
2014	Rp 43.718.000.000,-
2015	Rp 34.303.000.000,-
2016	Rp 28.650.000.000,-
2017	Rp 72.229.000.000,-

Sumber: BPS Kabupaten Samosir

Dalam tabel diatas di jelaskan bahwa jumlah PAD yang ada di kabupaten samosir. Jmlah PAD tersebut meliputi dari pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Adapun jumlah PAD di kabupaten samosir pada tahun 2013-2017 mengalami naik dan turun dimana bisa di lihat pada tahun 2013 sampai 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp 17.057.000.000,- . Tetapi pada tahun 2014 samapai 2016 PAD kabupaten samosir mengalai penurunan secara signifikan, penuruna ini dikarenakan karna kurangnya fasilitas yang memadahi terhadap pengunjung yang datang ke kabupaten samosir seperti sarana dan prasarana. Pada tahun 2017 PAD kabupaten samosir meningkat pesat tiga kali lipat dari tahun sebelumnya, bisa di lihat dari tabel di atas peningkatan tersebut meningkat sebesar Rp 43.579.000.000,-. Dimana dalam hal ini sektor pariwisata sebagai penyumbang terbesar dalam memberikan pendapatan retribusi dan juga pajak terhadap PAD kabupaten samosir.

Kabupaten Samosir merupakan salah satu daerah yang sedang mengembangkan pariwisata daerah. Kabupaten Samosir mempunyai potensi wisata Danau Toba, pegunungan dan budaya (Batak). Pulau Samosir terkenal akan objek wisata Danau Toba dan Pulau Samosir sendiri yang berada di tengah-tengah Danau Toba. Danau Toba merupakan danau terbesar di Indonesia. Pulau Samosir sendiri memiliki kontur berbukit-bukit dan terdapat Gunung Pusuk Buhit. Keunikan ini menjadi daya tarik yang kuat bagi wisatawan. Selain itu,

keberadaan Suku Batak sebagai suku mendiami Pulau Samosir juga menjadi daya tarik unik tersendiri yang tidak terdapat di daerah lain. Peninggalan sejarah yang merupakan warisan nenek moyang Suku Batak masih banyak di temukan di daerah ini, seperti makam batu atau yang lebih kita kenal dengan sarkofagus dan rumah-rumah adat.

Kepariwisataan Danau Toba di Kabupaten Samosir sudah ada sejak dulu. Pada tahun 1970-an Pulau Samosir telah dikunjungi wisatawan mancanegara. Perayaan pesta Danau Toba yang diselenggaraan setiap tahun menjadi salah satu pertanda bahwa kepariwisataan di daerah ini sudah dikenal cukup lama baik di dalam maupun di luar negeri.

Sebelum tahun 2003, wilayah Kabupaten Samosir masih merupakan bagian dari Kabupaten Toba Samosir. Pada tahun 2003 Kabupaten Toba Samosir mengalami pemekaran menjadi Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Samosir. Salah satu alasan terbentuknya Kabupaten Samosir adalah untuk mengembangkan pariwisata Danau Toba di wilayah Kabupaten Samosir. Hal ini tertulis dalam visi Kabupaten Samosir yaitu *Samosir Menjadi Daerah Tujuan Wisata Lingkungan Yang Inovatif 2015*.

Setelah samosir sudah di merkarkan dari kabupaten toba samosir beberapa objek wisata sudah ada di kabupaten samosir. Adapun onjek wisata yang sudah ada di kabupaten samosir sudah menyumbangkan pendapatan baik itu dari retribusi maupun pajak yang sudah di tentukan oleh pemerinyah kabupaten samosir. Adapun jumlah objel wisata yang ada di kabupaten samosir sudah berkembang pesat sampai pada sekarang ini.

Tabel 1.2 Jumlah Objek Wisata di Kabupaten Samosir Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Objek Wisata di Kabupaten Samosir (tempat)
2013	72
2014	75

2015	75
2016	75
2017	87

Sumber: BPS Kabupaten Samosir

Pada Tabel di atas diketahui bahwa sektor pariwisata kabupaten samosir mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Namun padatahun 2017 jumlah objek wisata di kabupaten samosir mengalami peningkatan yang cukup drastis yaitu sebanyak 12 objek wisata. Hal ini terjadi karena dinas Pariwisata Kabupaten Samosir sedang gencar-gencarnya melakukan pengembangan pariwisata kawasan Danau Toba yang ditetapkan Pemerintah Pusat sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Terlebih, masyarakat juga turut ambil bagian dalam pengembangan ini yaitu dengan membuka lahan baru yang cocok dijadikan sebagai objek wisata. Maka dengan terjadinya peningkatan jumlah objek wisata tersebut akan menambah pendapatan di kabupaten samosir.

Adanya objek wisata di kabupaten samosir yang sudah berkembang pada saat ini sangat memberikan kontribusi besar bagi Pendapatan Asli Daerah di kabupaten samosir. Dimana dalam hal ini bisa dilihat pengembangan dari objek wisata kabupaten samosir di dukung dari adanya retribusi atau pajak yang sudah di atur oleh pemerintah kabupaten samosir yang nantinya dimasukkan dalam PAD kabupaten samosir. Dalam PAD tersebut pemerintah akan melakukan pembenahan dari objek wisata kabupaten yang samosir yang akan nantinya dapat membuat lebih banyak objek wisata yang akan di kunjungi oleh masyarakat yang ada, baik itu wisatawan domestik maupun wisatawan asing.

Sektor pariwisata merupakan sektor yang berperan penting dalam perekonomian Kabupaten Samosir. Pariwisata Kabupaten Samosir berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah. Pariwisata mampu memberikan lapangan pekerjaan

kepada masyarakat, berikut ini dijelaskan pertambahan dari wisatawan selama lima tahun terakhir.

Tabel 1.3. Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Samosir Tahun 2013-2017

Sumber: Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Samosir, 2015

Pada Tabel di atas diketahui bahwa, pariwisata Kabupaten Samosir mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Hal ini diketahui berdasarkan jumlah kunjungan

wisatawan yang mengalami

kenaikan setiap tahun,

dimana jumlah wisatawan

domestik dan mancanegara

bertambah setiap tahun. Adapun di

Tahun	Domestik	Mancanegara	Total
2013	124,117	25,662	149,779
2014	140,637	30,450	171,087
2015	141,215	34,248	175,463
2016	154,905	35,823	190,728
2017	222,288	55,771	278,059

tahun dimulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, jumlah wisatawan menjadi meningkat pesat hampir dua kali lipat, pertambahan jumlah wisatawan tertinggi berada pada tahun 2017 untuk masing-masing wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara.

Sedangkan pada tahun 2013 merupakan jumlah wisatawan dengan kunjungan paling sedikit, ini menunjukkan bahwa minat dari wisatawan domestik dan mancanegara terhadap objek wisata di Samosir meningkat dari tahun ke tahun. Adapun pengaruh terhadap PAD pada jumlah pariwisata yang berkunjung ke Samosir menunjukkan peningkatan, berdasarkan data yang disajikan tersebut jumlah wisatawan memberikan sumbangan besar terhadap pendapatan

Samosir melalui retribusi yang dikutip dari objek wisata, sumbangan ini kemudian diharapkan memicutimbulnya beberapa objek yang baru pada pariwisata kabupaten Samosir, kemudian jumlah pendapatan itu kemudian digunakan untuk pembenahan di beberapa sektor dalam pengembangan jumlah wisatawan yang akan berkunjung ke Kabupaten Samosir.

Dalam meningkatkan objek wisata yang akan di kunjungi oleh wisatawan domestic dan mancanegara di kabupaten samosir, maka harus adanya pendapatan yang dimana dalam pendapatan ini akan membuat objek wisata yang ada akan semakin baik dan indah untuk di kunjungi oleh wisatawan. Adapun data PAD yang dimiliki oleh kabupaten samosir adalah:

Tabel 1.4 Pendapatan Wisata Kab. Samosir 2014-2017

Tahun	Total Pendapatan Wisata (rupiah)
2014	Rp 200.556.000
2015	Rp 203.982.000
2016	Rp 263.646.000
2017	Rp 422.972.000

Sumber: Dinas Pariwisata Kab. Samosir

Pada Tabel 1.3 diketahui bahwa Pendapatan Wisata kabupaten samosir meningkat di empat tahun terakhir. Hal ini diketahui bahwa pendapatan objek wisata kabupaten samosir diambil dari jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke kabupaten samosir yang dimana dalam ini retribusi dan pajak yang di tentukan oleh pemerintah daerah kabupaten samosir, dimana di setiap tahunnya meningkat secara signifikan.

Adapun peningkatan Pendapatan Wisata tersebut bisa kita lihat dalam tabel, yang dimana pada tahun 2015 Peningkatan Pendapatan wisata kabupaten samosir meningkat dari tahun sebelumnya yaitu dari tahun 2014 yang berkisar Rp 3.426.000, pada tahun 2015 Pendapatan Wisata kabupaten samosir juga meningkat pesat di tahun 2016 yang berkisar Rp 59.664.000, tetapi pada tahun 2016 peningkatan Peningkatan Wisata kabupaten samosir

sangat meningkat besar dua kali lipat yang dimana peningkatan ini terlihat dari jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke kabupaten samosir, peningkatan tersebut terlihat pada tahun 2017, peningkatan tersebut terlihat besar yaitu yang beselisih berkisar sekitar Rp 159.326.000.

Pada peningkatan Pendapatan Wisata di kabupaten samosir di dukung dari peningkatan objek wisata dan jumlah kunjungan wisatan yang ada di kabupaten samosir. Pada jumlah objek wisata yang dari tahun 2014 – 2016 memiliki jumlah objek wisata yang sama tetap membuat pendapatan wisata kabupaten samosir meningkat semestinya yang dapat di lihat pada tabel diatas. Tetapi pada peningkatan jumlah objek wisata pada tahun 2016 – 2017 membuat Pendapatanwisata kabupaten samosir meningkat pesat dua kali lipat yang dimana juga di dukung oleh jumlah wisatawan yang berkunjung ke samosir meningkat dua kai lipat. Peningkatan tersebut membuat pemerintahan kabupaten samosir semakin optimis dalam membenahan objek wisata di kabupaten Samir.

Potensi dari daerah wisata ini kemudian yang akan menstimulun daerah dalam meningkatkan keunggulan daerah agar semakin kuat pula. Kemampuan daerah ini dapat diukur dari Pendapatan Asli Daerah nya atau yang kemudian disingkat menjadi PAD. Apabila PAD dapat dioptimalkan dan dikelola secara profesional dengan menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah serta kemauan yang kuat dari seluruh *stakeholder*, maka akan dapat menumbuhkan daya saing daerah yang kompetitif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program yang prorakyat.

Berdasarkan latar belakang dan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk membahas topik ini lebih lanjut dalam penelitian skripsi dengan judul **“Analisis Pengaruh Jumlah Objek Wisata, Jumlah Pendapatan Wisata, dan Jumlah**

Wisatawan Domestik dan Mancanegara Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Samosir (2005 – 2018)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sebelumnya maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

- 1. Bagaimanakah jumlah objek wisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Kabupaten Samosir tahun 2005-2018 ?*
- 2. Bagaimanakah jumlah pendapatan wisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Kabupaten Samosir tahun 2005-2018 ?*
- 3. Bagaimanakah jumlah wisatawan domestik dan manca negara berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Kabupaten Samosir tahun 2005-2018 ?*

1.3. Tujuan Penelitian

Jika melihat dari rumusan masalah, maka penelitian ini diharapkan memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut ini :

- 1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah objek wisata terhadap PAD di Kabupaten Samosir ?*
- 2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah pendapatan wisata terhadap PAD di Kabupaten Samosir ?*

3. *Untuk mengetahui pengaruh jumlah wisatawan domestik dan mancanegara terhadap PAD di Kabupaten Samosir ?*

1.4. Manfaat Penelitian

Jika melihat dari tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat-manfaat sebagai berikut ini :

1. *Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, wawasan serta pengalaman penulis dalam meneliti.*
2. *Sebagai kajian dan masukan untuk melakukan peniliat berikutnya.*
3. *Untuk memperkaya khazanah analisis – analisis ekonomi regional, khususnya sektor pariwisata di Kabupaten Samosir.*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

“Pendapatan Asli Daerah yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”³ Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah. Pemerintah daerah dapat menggali sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut secara optimal.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar sistem pemerintahan negara. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,

³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 **Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah**

makapenyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang diatas, kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah pusat memberikan kewenangan pajak (taxing power) kepada daerah agar dapat berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan daerah pasal 1 ayat 18 disebutkan bahwa (Local Government Original Receipt) adalah Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan PAD ini berdasarkan pasal 3 yakni memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Kemudian, Abdul Halim dalam Dewi Oktaviana menjelaskan bahwa,

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya sumber-sumber PAD terdiri dari beberapa unsur yaitu; pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkannya, dan lain-lain pendapatan yang sah.⁴

Jika memperhatikan dari konsep diatas maka dapat diketahui bahwa otonomi daerah itu adalah hak yang dimiliki oleh daerah untuk mengelola dan memenuhi kebutuhan daerahnya

⁴ Dewi Oktaviana, Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dalam Rangka Otonomi Daerah : Pendekatan Error Correction Model, **Jurnal Ekonomi Pembangunan**, Volume 10, Nomor 2, Desember 2012, hal. 92.

termasuk jumlah tambahan modal agar kemudian di akumulasikan untuk menjadi Pendapat Asli Daerah yang bersumber dari beberapa unsur-unsur yang telah ditetapkan sebelumnya

2.1.1. Sumber Pendapatan Daerah

Untuk menjalankan pemerintah daerah yang otonom dan berdaya saing, maka pemerintah daerah telah menyiapkan beberapa strategi dalam mencapai hal tersebut, salah satu yang menjadi perhatian adalah sumber pendapatan daerah.

Sumber pendapatan daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 157 sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut sebagai PAD**
 - 1. Hasil Pajak Daerah**
 - 2. Hasil Retribusi Daerah**
 - 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**
 - 4. Lain-lain PAD yang sah**
- b. Dana Perimbangan**
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah⁵**

Potensi dari daerah yang digambarkan dengan sumber-sumber pendapatan daerah tersebut haruslah dapat di optimalkan demi mendukung dan meningkatkan kemampuan daerah dalam bersaing dengan daerah lainnya. Hal ini serupa dengan pendapat dari Sulistyorini dalam Baihaqi berikut ini,

Pada prinsipnya semakin besar kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Dengan kontribusi yang semakin meningkat, diharapkan pemerintah daerah semakin mampu membiayai keuangannya. Gambaran kemandirian keuangan daerah ini dapat diketahui melalui besarnya kemampuan sumber daya keuangan dalam membiayai pelayanan kepada masyarakat daerah tertentu.⁶

2.2. Sektor Pariwisata

⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157 Tentang Pemerintah Daerah

⁶ Baihaqi, Analisis Kontribusi Pendaptan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu, **Jurnal Akuntansi**, Volume 1, Nomor 3, 2011, hal. 248.

Harapan akan optimalisasi sector perekonomian, diharapkan mampu untuk menjadikan suatu daerah/wilayah menjadi berdaya saing, salah satu sector yang sedang menjadi perhatian pemerintah adalah bidang pariwisata. Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

Kemudian, apakah pengertian dari pariwisata itu sendiri. Secara sederhana pariwisata diartikan sebagai:

Pariwisata adalah gerakan sementara orang untuk tujuan diluar tempat kerja normal dan tempat tinggal, kegiatan yang dilakukan selama mereka tinggal di tujuan tersebut, dan fasilitas diciptakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pariwisata meliputi berbagai segi kehidupan masyarakat, mulai dari kegiatan transportasi, akomodasi, atraksi wisata, makanan dan minuman, cinderamata, pelayanan, suasana kenyamanan.⁷

Berbeda dari pengertian sebelumnya, Kodhyat dalam Sefira Ryalita Primadany, Mardiyono dan Riyanto menjelaskan pariwisata sebagai berikut ini,

Pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain bersifat sementara, dilakukan perorangan atau kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi social, budaya, alam dan ilmu.⁸

Sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang pariwisata menjelaskan bahwa, “pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.”⁹

Jika memperhatikan pengertian dan uraian di atas jelas bahwa pariwisata secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan yang bergerak di bidang wisata dan rekreasi serta ber

⁷ I Gusti Agung Satria Wijaya Dan Iketut Djayastra : “Pengaruh Kunjungan Wisatawan, Jumlah Tingkat Hunian Kamar Hotel Dan Jumlah Kamar Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung, Gianyar, Tabanan Dan Kota Denpasar Tahun 2001-2010”, **E-Jurnal EP Unud**, Volume 3, Nomor 11, November 2014, Hal 514.

⁸ Sefira Ryalita Primadany, Mardiyono, Riyanto, Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah (Studi Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk), **Jurnal Administrasi Publik (JAP)**, Volume 1, Nomor 4, halaman 137, Tahun 2013.

⁹ UU No. 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata

orientasi pada penyediaan fasilitas terkait kegiatan-kegiatan sejenis. Cohen menjelaskan bahwa ada beberapa dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh pariwisata :

Dampak pariwisata terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal dapat dikategorikan menjadi delapan kelompok besar, yaitu:

- a. dampak terhadap penerimaan devisa
- b. dampak terhadap pendapatan masyarakat
- c. dampak terhadap kesempatan kerja
- d. dampak terhadap harga-harga
- e. dampak terhadap distribusi manfaat/keuntungan
- f. dampak terhadap kepemilikan dan control
- g. dampak terhadap pembangunan pada umumnya, dan
- h. dampak terhadap pendapatan pemerintah.¹⁰

2.3. Objek Wisata

Pada praktiknya untuk optimalisasi sektor pariwisata, salah satu pendorongnya adalah objek wisata, semakin banyak jumlah objek wisata, maka hal ini secara langsung akan mempengaruhi jumlah pendapatan daerah.

Objek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. Dalam kedudukannya yang sangat menentukan itu maka objek wisata harus dirancang dan dibangun atau dikelola secara professional sehingga dapat menarik wisatawan untuk datang dan membangun suatu objek wisata harus dirancang sedemikian rupa berdasarkan kriteria yang cocok dengan daerah wisata tersebut. Objek wisata umumnya berdasarkan pada :

- a. adanya sumberdaya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman dan bersih
- b. adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya
- c. adanya ciri khusus/spesifikasi yang bersifat langka
- d. objek wisata alam memiliki daya Tarik tinggi karena keindahan alam pegunungan, sungai, pantai, pasir, huta, dan sebagainya.
- e. Objek wisata budaya mempunyai daya Tarik tinggi karena memiliki nilai khusus dalam berbagai bentuk.¹¹

Pengelolaan terhadap objek pariwisata harus dapat dimaksimalkan. Hal ini akan berkaitan dengan sumber dan jumlah total pendapatan daerah yang dimiliki, jenis pendapatan ini juga

¹⁰ I Gede Pitanadan I Ketut Surya Diarta, **Pengantar Ilmu Pariwisata**, Edisi Satu (1), Yogyakarta : Penerbit Andi, 2009, Hal.185

¹¹ Lia Ardiani Windryaningrum, **Pengaruh Tingkat Hunian Hotel, Jumlah Wisatawan, Dan Objek Wisata Terhadap Pendapatan Sector Pariwisata Di Kabupaten Kudus Tahun 1981-2011**, Semarang : Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, 2013, Hal. 32, (Skripsi Tidak Diterbitkan)

berbeda sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan dalam proses pengelolaan objek wisata. Objek pariwisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. Dalam kedudukannya yang sangat menentukan itu maka objek wisata harus dirancang dan dibangun atau di kelola secara profesional sehingga dapat menarik wisatawan untuk datang. Membangun suatu objek wisata harus dirancang sedemikian rupa berdasarkan kriteria yang cocok dengan daerah wisata tersebut.

Pengembangan pariwisata secara tidak langsung akan mempengaruhi saran dan prasarana. Prasarana objek wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan, dan lain sebagainya, dan itu termasuk kedalam prasarana umum. Untuk kesiapan objek wisata yang akan dikunjungi oleh wisatawan di daerah tujuan wisata, kondisi objek wisata yang bersangkutan.

2.4. Pendapatan Wisata

Jenis dan sumber-sumber pendapatan dari sector pariwisata merupakan salah satu hal yang penting untuk menjadi perhatian dalam melihat bagaiman efek yang ditimbulkan dari sector pariwisata tersebut, sehingga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat,

Seseorang dengan kebutuhan wisata adalah inti/pangkal (keistimewaan apa saja atau karakteristik suatu tempat yang akan mereka kunjungi). Seseorang melakukan perjalanan wisata dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menjadi daya tarik yang membuat seseorang rela menghabiskan dana yang cukup besar. Suatu daerah harus memiliki daya tarik yang besar agar para wisatawan mau menjadikan tempat tersebut sebagai destinasi pariwisata.¹²

Lebih jauh lagi dijelaskan bahwa pendaptan pariwisata berasal dari keuntungan atas yang didapatkan dari objek pariwisata, “pendapatan objek pariwisata adalah merupakan sumber

¹² Indah Puspitasari, Moh. Saleh, Duwi Yunitasari, Analisis Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu Periode Tahun 2011-2015, *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, IESP Universitas Jember, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2018, halaman 12

penerimaan objek pariwisata yang berasal dari retribusi karcis masuk, retribusi parkir dan pendapatan lain-lain yang sah dari objek pariwisata tersebut”.¹³

Pungutan atas objek pajak tersebut demi terwujudnya semua objek wisata memerlukan sarana yang sama atau lengkap. Pengadaan sarana wisata tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan. Sarana wisata secara kuantitatif menunjuk pada jumlah sarana wisata yang harus disediakan, dan secara kualitatif menunjukan pada mutu pelayanan yang diberikan dan yang tercermin pada kepuasan wisatawan yang memperoleh pelayanan.

Pada proses penyediaan sarana dan prasarana ini maka jenis pungutan atas penggunaan asset daerah dengan potensi usaha maka akan dikenakan pajak. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2009 yang tertuang dalam bab tiga pasal empat dan lima,

Pasal Empat (4)

Dengan nama retribusi memasuki obyek wisata dipungut retribusi atas pelayanan dan atau penyediaan tempat wisata yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah Kabupaten Samosir.

Pasal Lima (5)

Obyek retribusi adalah penyediaan fasilitas objek wisata yang meliputi objek wisata alam, wisata budaya dan wisata minat khusus.¹⁴

Jika memperhatikan uraian dari peraturan tersebut, maka jelas diketahui bahwa sumber pendapatan wisata berasal dari retribusi pajak atas penggunaan fasilitas-fasilitas pariwisata.

2.5. Penelitian Terdahulu

Pada saat penyusunan judul penelitian ini, digunakan beberapa sumber literasi dan studi empiris sebagai inspirasi dan dasar penulis untuk mengangkat judul yang sesuai dengan topik penelitian. Ada 4 yang digunakan, yaitu:

¹³Eko Satriadi Putra, **Pengaruh Jumlah Wisatawan, Tingkat Hunian Hotel, Jumlah Objek Wisata Dan Retribusi Objek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Selatan**, Jurnal STKIP PGRI Sumatera Barat, Padang 2017, Hal 5.

¹⁴Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2009 **Tentang Retribusi Objek Wisata**

1. Penelitian Rian Saputra (2018) dengan judul penelitian “Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Obyek Wisata, dan Retribusi Obyek Wisata, Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2012-2016” menyimpulkan hasil penelitian bahwa “jumlah kunjungan wisatawan, jumlah obyek wisata dan retribusi obyek wisata memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah”.¹⁵
2. Penelitian Candriyani Sulistiyowati dengan judul penelitian “Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Retribusi Obyek Wisata, Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar” menyimpulkan bahwa **“jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh dengan arah negative terhadap pendapatan asli daerah, retribusi obyek wisata berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah, pajak hotel berpengaruh dengan arah negative terhadap pendapatan asli daerah, dan pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah”**.¹⁶
3. Penelitian Fawaidul Khoir, Hety Mutika Ani, Wiwin Hartanto dengan judul penelitian “Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011-2017” menyimpulkan bahwa hasil analisis kontribusi pada penelitian ini menunjukkan

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD yang positif setiap tahunnya meskipun mengalami fluktuatif, meskipun setiap tahunnya pendapatan dari sektor pariwisata selalu mengalami kenaikan. Kontribusi terbesar terdapat pada tahun 2011 yaitu sebesar 3,96 %. Kontribusi terbesar ini disebabkan karena pendapatan sektor pariwisata dari penerimaan retribusi tempat parkir khusus cukup besar serta kecilnya peningkatan penerimaan sektor-sektor PAD lainnya yang sah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk kontribusi terendah terdapat pada tahun 2017 yaitu sebesar 2,87%. Penurunan ini disebabkan karena peningkatan penerimaan dari sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah yang sangat tinggi. Sehingga menyebabkan kontribusi sektor pariwisata sangat kecil meskipun total pendapatan dari sektor pariwisata sendiri mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hasil analisis selanjutnya analisis trend yang menunjukkan ramalan pendapatan pada tahun-tahun selanjutnya akan terus meningkat. Ramalan pendapatan sektor pariwisata Kabupaten

¹⁵Rian Saputra, **Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Obyek Wisata, dan Retribusi Obyek Wisata, Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2012-2016**, Yogyakarta tahun 2018.

¹⁶Candriyani Sulistiyowati, **Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011-2017**, Surakarta tahun 2017.

Jember pada tahun 2018 sekitar 24,6 M dan akan terus meningkat di tahun-tahun berikutnya”.¹⁷

4. Penelitian Nina Sabrina dan Irma Mudzhalifah dengan judul penelitian “Pengaruh Jumlah Objek Wisata, Jumlah Wisatawan Dan Tingkat Hunian Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Penerimaan Sektor Pariwisata Sebagai Variabel Moderating Pada Dinas Pariwisata Kota Palembang” menyimpulkan bahwa:

Jumlah Objek Wisata, Jumlah Wisatawan, dan Tingkat Hunian Hotel memiliki pengaruh secara simultan yang signifikan terhadap PAD, Jumlah Objek Wisata, Jumlah Wisatawan, dan Tingkat Hunian Hotel memiliki pengaruh secara simultan yang signifikan terhadap PAD dengan Penerimaan Sektor Pariwisata sebagai Variabel Moderating; Jumlah Objek Wisata memiliki pengaruh secara simultan terhadap PAD dengan Penerimaan Sektor Pariwisata sebagai Variabel Moderating; Penerimaan Sektor Pariwisata sebagai Variabel Moderating tidak dapat memoderasi Jumlah Wisatawan terhadap PAD dan Penerimaan Sektor Pariwisata sebagai Variabel Moderating memperlemah pengaruh Tingkat Hunian Hotel terhadap PAD. Jumlah Objek Wisata memiliki pengaruh secara parsial yang signifikan terhadap PAD; Jumlah Wisatawan tidak memiliki pengaruh secara parsial yang signifikan terhadap PAD; Tingkat Hunian Hotel memiliki pengaruh secara parsial yang signifikan terhadap PAD dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Sektor Pariwisata sebagai variabel moderating yang digunakan didalam penelitian ini justru memperlemah hubungannya antara Jumlah Objek Wisata, Jumlah Wisatawan dan Tingkat Hunian Hotel sebagai terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).¹⁸

2.6. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan dari beberapa data terkait pariwisata. Penerimaan sektor pariwisata tidak terlepas dari peran pajak dan retribusi. Dengan menjumlahkan pajak dan retribusi seperti jumlah objek wisata, jumlah pendapatan wisata, dan jumlah wisatawan domestik dan mancanegara dan pendapatan yang lain maka nantinya akan di dapat pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jumlah objek wisata, jumlah pendapatan wisata, dan jumlah wisatawan

¹⁷Fawaidul Khoir, Hety Mutika Ani dan Wiwin Hartanto, **Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011-2017**, Jurnal Pendidikan Ekonomi, Volume 12 No.2 , tahun 2018

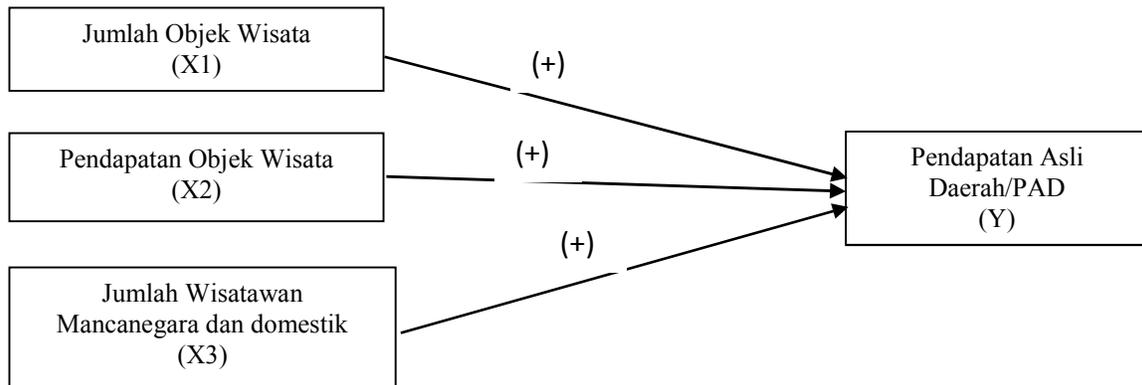
¹⁸ Nina Sabrina dan Irma Mudzhalifah, **Pengaruh Jumlah Objek Wisata, Jumlah Wisatawan Dan Tingkat Hunian Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Penerimaan Sektor Pariwisata Sebagai Variabel Moderating Pada Dinas Pariwisata Kota Palembang**, Volume 3, No. 2, November 2018.

domestik dan mancanegara mempunyai hubungan positif terhadap pendapatan asli daerah di sektor pariwisata karena semakin tinggi jumlah objek wisata, pendapatan wisata dan jumlah wisatawan maka secara langsung akan meningkatkan pendapatan di sektor pariwisata yang pada akhirnya akan menaikkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi yang di terima. Adapun sumber PAD yang terdiri dari penerimaan yang di peroleh dari beberapa unsur yang ada yaitu dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan juga pendapatan yang sah. Pada penyediaan jumlah objek wisata, jumlah pendapatan wisata, jumlah wisatawan domestik dan mancanegara maka pemerintah meyusun suatu peraturan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Samosir nomor 7 tahun 2009 tentang Retribusi Objek Wisata.

Semakin lama wisatawan di suatu daerah tujuan wisata, maka semakin banyak pula uang yang dibelanjakan dan digunakan di daerah tujuan wisata tersebut, paling sedikit untuk keperluan kunjungan wisatawan yang ada di daerah tersebut. Berbagai macam kebutuhan wisatawan selama perjalanan wisatanya akan menimbulkan gejala komsumtif untuk produk-produk yang ada di daerah tujuan wisata. Hal ini dapat diasumsikan bahwa jika wisatawan banyak berkunjung, semakin besar pula pendapatan dari berbagai pajak dan retribusi pariwisata yang diperoleh.

Salah satu faktor yang membuat seseorang untuk mengunjungi suatu daerah adalah karena adanya obyek wisata yang menarik untuk dikunjungi di daerah tersebut. Hal ini tidak lepas dari peran pemerintah, swasta dan masyarakat untuk menciptakan atau membuka obyek-obyek wisata yang menarik untuk dikunjungi. Membangun suatu obyek wisata harus dirancang sedemikian rupa berdasarkan sedemikian rupa berdasarkan kriteria yang cocok dengan daerah wisata tersebut. Dengan demikian, jumlah obyek wisata yang ada diharapkan dapat

meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pariwisata, baik melalui pajak daerah maupun retribusi daerah



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

2.6 Hipotesis

Berdasarkan pada masalah pokok yang telah dikemukakan sebagai dasar untuk mengadakan analisis selanjutnya, penulis mengemukakan hipotesis sebagai jawaban sementara yang selanjutnya akan diuji sebagai berikut :

- a. Jumlah objek wisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Samosir.*
- b. Jumlah pendapatan wisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Samosir.*
- c. Jumlah wisatawan domestik dan mancanegara berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Samosir.*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Utara, dengan menganalisis Jumlah objek wisata, jumlah pendapatan wisata ,dan jumlah wisatawan domestik dan mancanegara terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Samosir.

3.2. Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang bersumber dari Badan Pusat Statistik(BPS) Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Samosir tahun 2005-2018. Data yang dibutuhkan antara lain adalah data yang berkaitan dengan jumlah objek wisata, jumlah pendapatan wisata dan jumlah wisatawan domestik dan mancanegara, dan pendapatan asli daerah (PAD).

3.3. Analisis Data

3.3.1. Model Ekonometrik

Model yang digunakan untuk menganalisis jumlah objek wisata, jumlah pendapatan wisata, jumlah wisatawan domestik dan mancanegara, terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kab. Samosir tahun (2005-2018) adalah model ekonometrik.

Penggunaan ekonometrik dalam analisis struktural dimaksudkan untuk mengukur besaran kuantitatif hubungan variabel-variabel ekonomi. Analisis struktural bertujuan memahami ukuran kuantitatif, pengujian dan validasi hubungan variabel-variabel ekonomi. Model ekonometrik yang digunakan adalah model regresi linier berganda.

3.3.2 Penggunaan Model Ekonometrik

Model analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis statistik berupa regresi linier berganda. Model persamaannya regresi linier berganda (persamaan regresi sampel) adalah sebagai berikut:

$$Y_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_1 + \hat{\beta}_2 X_2 + \hat{\beta}_3 X_3 + \varepsilon_i; \quad i=1,2,3,\dots,n$$

Dimana :

Y = Pendapatan Asli Daerah

$\hat{\beta}_0$ = Intersep

$\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2, \hat{\beta}_3,$ = Koefisien Regresi (Statistik)

X_1 = Jumlah Objek Wisata di Kab. Samosir

X_2 = Jumlah Pendapatan Wisata di Kab. Samosir

X_3 = Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara di Kab.Samosir

ε_i = Galat (Error Term)

3.3.3 Pengujian Hipotesis

3.3.3.1 Uji Secara Individu (Uji-t)

1. Jumlah Objek Wisata(X_1)

$H_0 : \beta_1 = 0$ Artinya, Jumlah Objek Wisata Kabupaten tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

$H_1 : \beta_1 > 0$ Artinya, Jumlah Objek Wisata Kabupaten berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Jumlah Pendapatan Wisata (X_2)

$H_0 : \beta_2 = 0$ Artinya, Jumlah Pendapatan Wisata Kabupaten tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

$H_1 : \beta_2 > 0$ Artinya, Jumlah Pendapatan Wisata Kabupaten berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

3. Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara (X3)

$H_0 : \beta_3 = 0$ Artinya, Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara Kabupaten tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

$H_1 : \beta_3 > 0$ Artinya, Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara Kabupaten berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Koefisien regresi digunakan untuk mengukur perubahan variabel terikat jika variabel independen berubah satu satuan. Uji t dapat dilakukan dengan melihat nilai *probability* dengan taraf signifikannya. Apabila nilai Prob. $< \alpha$ maka variabel tersebut signifikan mempengaruhi variabel terikat dan sebaliknya. Pengujian terhadap hasil regresi dilakukan dengan menggunakan uji t pada derajat keyakinan 95% atau $\alpha = 5\%$ dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jika nilai *probability* t-statistik $< 0,05\%$ maka H_0 ditolak H_1 diterima
2. Jika nilai *probability* t-statistik $> 0,05\%$ maka H_0 diterima H_1 ditolak

3.3.3.2 Uji Secara Simultan (Uji F)

Uji F (Uji simultan) digunakan untuk menguji apakah secara bersama-sama variabel bebas dapat mempengaruhi variabel tak bebas.

Adapun langkah-langkah pengujian uji F sebagai berikut :

a. Membuat hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1) sebagai berikut :

$H_0 : \beta_1, \beta_2, \beta_3, = 0$ berarti variabel bebas

secara serempak/keseluruhan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

H_1 : β_i tidak semua nol , $i = 1, 2, 3$, berarti variabel bebas secara serempak/keseluruhan berpengaruh terhadap variabel terikat.

b. Mencari nilai F hitung ada nilai kritis F statistik dari tabel F. Nilai kritis F berdasarkan α dan df untuk *numerator* (k-1) dan df untuk *denominator* (n-k).

Rumus untuk mencari F_{hitung} adalah :

$$F_{hitung} = \frac{JKR(k-1)}{JKG(n-k)}$$

JKR : Jumlah Kuadrat Regresi

JKG : Jumlah Kuadrat Galat

k : Banyaknya koefisien regresi

n : Banyaknya sampel

Apabila nilai $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, maka H_0 diterima, artinya variabel bebas secara bersama-sama (simultan) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya, bila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 di tolak, artinya secara bersama-sama (simultan) variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

3.3.4 Uji Kebaikan-Suai : Koefisien Determinasi (R^2)

Uji kebaikan-suai bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi linier berganda yang digunakan sudah sesuai menganalisis hubungan antara variabel takbebas dengan variabel-variabel bebas. Untuk melihat kebaikan-suai model yang digunakan koefisien determinasi R^2 untuk mengukur seberapa besar keragaman variabel takbebas yang dapat dijelaskan oleh keragaman variabel-variabel bebas. Nilai koefisien determinasi R^2 adalah $0 \leq R^2 \leq 1$; $R^2 \rightarrow$

1 artinya “semakin angkanya mendekati 1 maka semakin baik garis regresi karena mampu menjelaskan data aktualnya.”¹⁹

3.3.5 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

3.3.5.1 Multikolinieritas

Menurut Agus Widarjono ”multikolinieritas adalah hubungan linier antara variabel independen di dalam regresi.”²⁰ Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.

Uji Multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat (korelasi yang kuat) di antara variabel bebas. Variabel-variabel bebas yang mempunyai hubungan tidak mungkin dianalisis secara terpisah pengaruhnya terhadap variabel terikat. Pengaruhnya terhadap nilai taksiran :

- a. Nilai-nilai koefisien mencerminkan nilai yang benar.
- b. Karena galat bakunya besar maka kesimpulan tidak dapat diambil melalui uji-t.
- c. Uji-t tidak dapat dipakai untuk menguji keseluruhan hasil taksiran.
- d. Tanda yang dihadapkan pada hasil taksiran koefisien akan bertentangan dengan teori.

Salah satu cara untuk mendeteksi gejala multikolinieritas adalah dengan melihat VIF (*Variance Inflation Factor*), bila nilai $VIF < 10$ maka dianggap tidak ada pelanggaran multikolinieritas, namun bila sebaliknya $VIF > 10$ maka dianggap ada pelanggaran multikolinieritas. Untuk mengetahui seberapa kuat atau seberapa parah kolinieritas (korelasi) antar sesama variabel bebas maka dapat dilihat dari matriks korelasi. Bila nilai matriks $> 0,95$ maka kolinieritasnya serius (tidak dapat ditolerir). Namun bila sebaliknya nilai matriks $< 0,95$ maka kolinieritas dari sesama variabel bebas masih dapat ditolerir. Cara lain yang dapat

¹⁹ Agus Widarjono, *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*, Edisi 4, Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2013, Hal 26

²⁰ *Ibid*, Hal 104

digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas adalah dengan menggunakan cara regresi sekuensial antara sesama variabel bebas. Nilai R^2 sekuensial dibandingkan dengan nilai R^2 pada regresi model utama. Jika R^2 sekuensial lebih besar daripada nilai R^2 pada model utama maka terdapat multikolinearitas.

3.3.5.2 Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara galat (kesalahan pengganggu, *disturbance error*) pada periode waktu t dengan galat pada periode waktu $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya.

Ada beberapa cara untuk menguji keberadaan serial autokorelasi, yaitu dengan uji: Durbin Watson (uji $D - W$). "Uji Durbin-Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel *lag* di antara variabel independen."²¹

Uji Durbin-Watson dirumuskan sebagai berikut:

Dengan jumlah sampel dan jumlah variabel tidak bebas tertentu diperoleh dari nilai kritis d_l dan d_u dalam tabel distribusi Durbin-Watson untuk berbagai nilai α . Secara umum bisa diambil patokan:

- Angka $D - W$ di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
- Angka $D - W$ di antara -2 sampai $+2$ berarti tidak ada autokorelasi.
- Angka $D - W$ di atas $+2$ berarti ada autokorelasi negatif.

²¹ Imam Gozali, **Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 2**, Edisi 7, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2013, Hal 108

3.3.5.3. Uji Run

Untuk mendeteksi ada atau tidak adanya autokorelasi dalam model yang digunakan dapat juga digunakan uji Run. Uji Run merupakan bagian dari statistika nonparametrik dapat digunakan untuk menguji apakah antar galat terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar galat (residu atau kesalahan pengganggu) tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa galat adalah acak atau random. "Uji Run digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis)."²² Cara yang digunakan dalam uji Run adalah sebagai berikut :

H_0 : Galat (res_1) acak (random)

H_1 : Galat (res_1) tidak acak

3.3.5.4 Normalitas

Sesuai teorema Gauss Markov :

$$Y_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_{1i} + \hat{\beta}_2 X_{2i} + \dots + \varepsilon_i$$

1. $\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$ Apakah galat (distribusi error) menyebar normal atau tidak
2. ε_i tidak terjadi autokorelasi

Asumsi klasik yang lain dalam pendugaan dengan menggunakan penduga OLS adalah kenormalan. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel galat atau residu memiliki sebaran normal. Penggunaan uji t dan f mengasumsikan bahwa nilai galat menyebar normal. "Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil."²³ untuk mendeteksi apakah galat menyebar normal atau tidak digunakan analisis grafik dan uji statistik.

1. Analisis Grafik

²²Ibid, Hal 146

²³Ibid, Hal 154

Untuk menguji normalitas galat dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antar data pengamatan dengan sebaran yang mendekati sebaran normal. Caranya adalah dengan melihat sebaran peluang normal yang membandingkan sebaran kumulatif dari ebaran normal. Sebaran normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan diagram data galat akan dibandingkan dengan garis diagonal tersebut. Jika sebaran data galat atau residu normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonal.

2. Untuk menguji apakah galat atau residu menyebar normal dengan menggunakan grafik dapat memberikan kesimpulan yang tidak tepat kalau tidak hati-hati secara visual. Oleh sebab itu dilengkapi dengan uji statistik, yaitu dengan melihat nilai kemencengan atau penjurulan (skewness) dan keruncingan (kurtosis) dari sebaran galat. Menurut Ghozali nilai z statistik untuk kemencengan dan nilai z keruncingan dapat dihitung dengan rumus, yaitu sebagai berikut :

$$Z_{skewness} = \frac{skewness}{\sqrt{\frac{6}{n}}} \text{ dan } Z_{kurtosis} = \frac{kurtosis}{\sqrt{\frac{24}{n}}}, \text{ dimana } n \text{ adalah ukuran sampel.}$$

Menurut Ghozali untuk menguji apakah sebaran galat pendugaan regresi menyebar normal atau tidak, dapat digunakan uji statistik lain yaitu uji statistik nonparametrik Kolmogrof-Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis sebagai berikut :

H_0 : Data galat (residu) menyebar normal

H_1 : Data galat tidak menyebar normal.

3.4. Definisi Operasional Variabel

1. Pendapatan Asli Daerah (Y)

Sumber penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber dalam daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku. Data pendapatan asli daerah

diperoleh dari Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Samosir. satuan data PAD dalam penelitian ini adalah miliar rupiah.

2. Jumlah Objek Wisata (X1)

Jumlah Objek Wisata merupakan Jumlah segala sesuatu yang ada di daerah tujuan wisata yang ada di kabupaten Samosir. Jumlah Objek Wisata dalam penelitian ini menggunakan data jumlah objek wisata yang dikeluarkan oleh Dinas atau lembaga yang sederajat di lingkungan Kabupaten Samosir.

3. Jumlah Pendapatan Wisata (X2)

Jumlah Pendapatan Wisata merupakan jumlah uang yang diterima oleh kabupaten Samosir dimana kebanyakan dari penjualan produk dan jasa pelayanan kepada pelanggan. Pendapatan suatu objek wisata yang ada di tentukan dari pajak dan retribusi oleh Bupati. Satuan data jumlah objek wiata dalam penelitian ini adalah juta rupiah.

4. Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara (X3)

Orang yang melakukan perjalanan atau kunjungan sementara secara sukarela kesuatu tempat diluar lingkungan tempat tinggalnya sehari-hari. Data ini dinyatakan dalam jumlah orang.